

KATA PENGANTAR

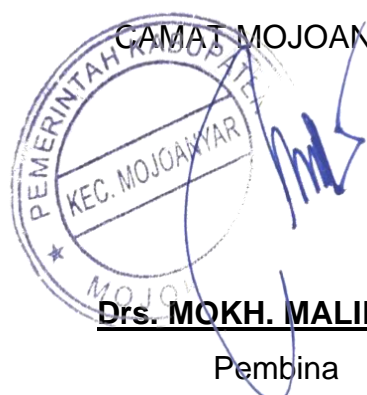
Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

CAMAT MOJOANYAR



Drs. MOKH. MALIK, MM
Pembina

NIP. 196609141995031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

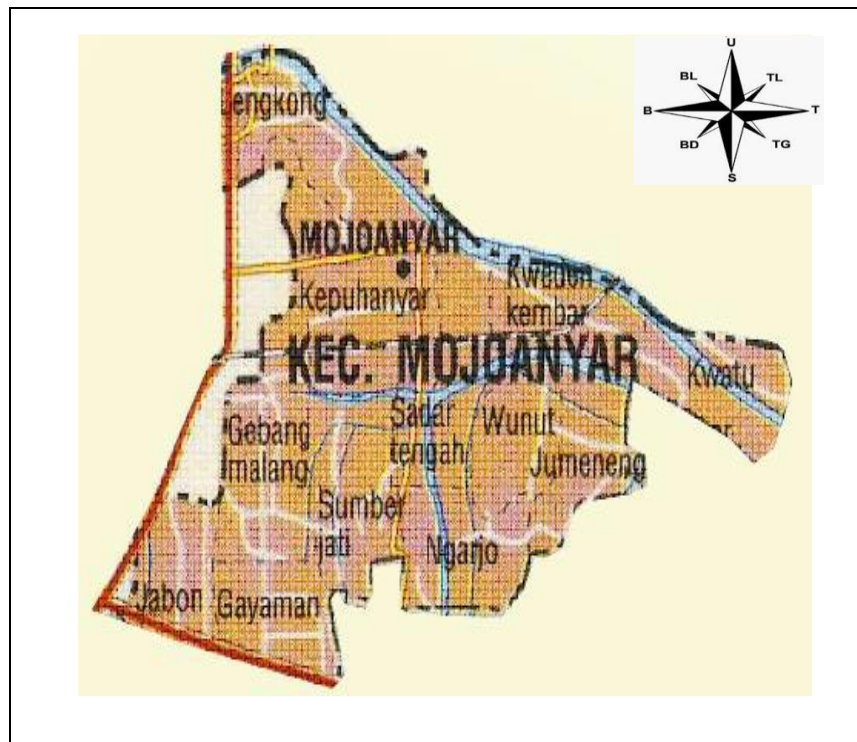
Kecamatan Mojoanyar berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto. Dari luas wilayah 2360 Km² Kecamatan Mojoanyar, yang terdiri dari 1491 ha adalah lahan pertanian dan Non Pertanian 225 ha dan bukan pertanian 644 Ha. dengan

kepadatan penduduk Kecamatan Mojoanyar sebanyak 50.591 jiwa terdiri dari 25.508 Jiwa laki-laki dan 25.083 jiwa perempuan.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Mojoanyar sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tarik Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangsal
- Sebelah Selatan: Kecamatan Puri
- Sebelah Barat : Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

PETA KECAMATAN MOJOANYAR



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Mojoanyar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Mojoanyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kemasyarakatan;
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan;
8. Jabatan Fungsional Umum.

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

1. Faktor Kekuatan Organisasi

- a) Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- b) Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas;
- c) Adanya Infrastruktur kecamatan seperti gedung kantor yang memadai;

d) Adanya kebersamaan dan sistem koordinasi intern yang baik.

2. Faktor Kelemahan Organisasi

- a) Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2018, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 12 orang pegawai.
- b) Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor startegis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi

- a) Kecamatan Mojoanyar merupakan pusat lumbung pertanian sehingga sangat prospektif untuk membuka peluang usaha - usaha produktif.
- b) Kondisi Wilayah Kecamatan Mojoanyar juga termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c) Adanya perbaikan dan pembangunan Infra struktur baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun oleh Pemerintah Desa yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan poros, jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jembatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke kawasan Mojoanyar khususnya dikawasan utara Mojoanyar sebagai kawasan industri. Dengan munculnya kawasan industri seperti ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
- d) Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

2. Faktor Tantangan Organisasi

- a) Masih tingginya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.
- b) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan.
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
- e) Terdapat aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Mojoanyar tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Mojoanyar pada tahun 2021 sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021
KECAMATAN MOJOANYAR

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	975 pelayanan
		1.4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	81 %
		1.5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan
		1.6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan
		1.7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 fasilitasi
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	62
		2.2	Nilai SAKIP	73

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KECAMATAN MOJOANYAR

KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	975 pelayanan
		1.4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	81 %
		1.5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan
		1.6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan

		1.7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 fasilitasi
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	62
		2.2	Nilai SAKIP	73

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.163.065.378,00	PAPBD 2021
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.000.000,00	PAPBD 2021
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.000.000,00	APBD 2021
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.900.000,00	PAPBD 2021
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	42.500.000,00	APBD 2021

**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERBAIKAN TAHUN 2021
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap PATEN	81%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	81%
		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan, bidang ketentraman dan ketertiban umum, Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan	81%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.027.593.378,00	APBD 2021
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000,00	APBD 2021
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.000.000,00	APBD 2021
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	65.000.000,00	APBD 2021
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	42.500.000,00	APBD 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Mojoanyar tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Mojoanyar tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81		
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	81 %	100%
		1.3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	975 pelayanan	975 pelayanan	100%
		1.4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	81 %	81 %	100%
		1.5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi

		1.6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi
		1.7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	62	64	100 %
		2.2	Nilai SAKIP	73	74	100 %

b. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan dengan indikator kinerja Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP pada Kecamatan Mojoanyar dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 99%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Mojoanyar dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 96%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Mojoanyar pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79 Baik			
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	79 %	79 %		
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	1%		
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	80%		94,74 %	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum,	80 %		97,67 %	

	Kesejahteraan Sosial				
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	81%			99%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	81%			96%

b) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	79%	79 %	79%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	1%	1%

Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	99%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	96%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	81%	99%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	81%	96%	100%

c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	99%	-	-
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	96%	-	-

d) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	34.000.000	81%

	Kecamatan			
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	180.400.000	81%

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	81%	81%	100%	34.000.000	33.854.100,00	99,51%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	81%	81%	100%	180.400.000	177.051.000	96,66%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP	81%	81%	100%	34.000.000	33.854.100,00	99,51%

Pelayanan Publik							
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Kesejahteraan Masyarakat	81%	81%	100%	80.000.000,00	78.836.500,00	98,52 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	81%	81%	100%	57.900.000,00	56.017.400,00	94,16 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	81%	100%	42.500.000,00	42.197.100,00	98,80 %

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	100%	99,51%	0,49%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	96,66%	3,34%

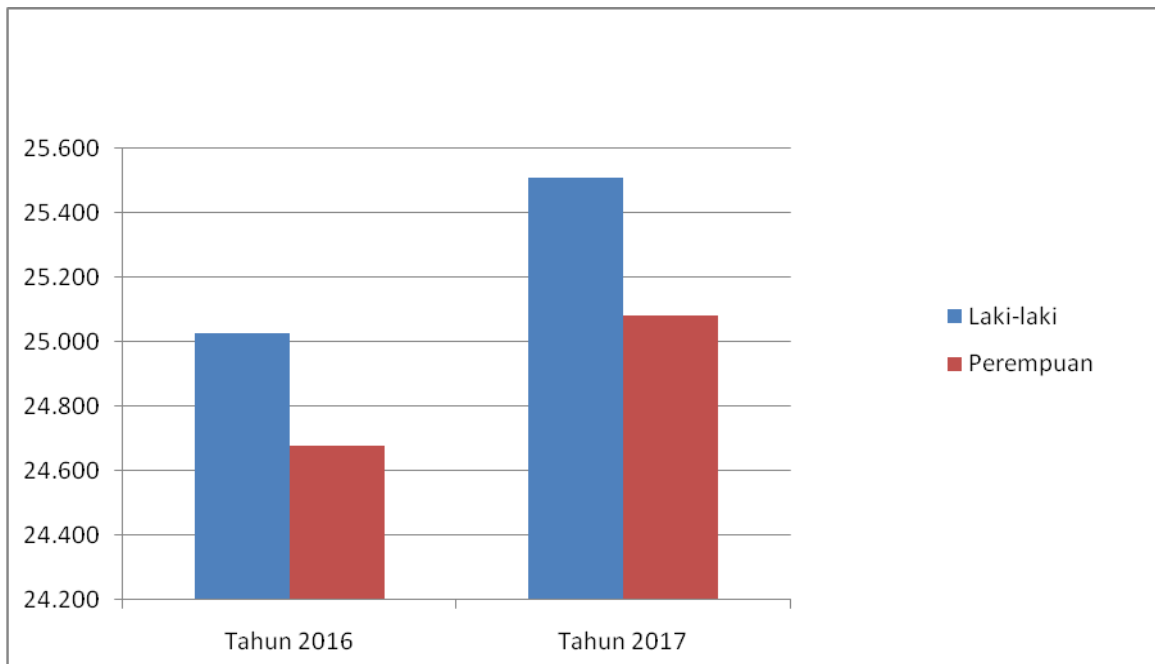
PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

Persentase Penduduk Kec.MojoanyarKabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2017

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2016	25.026	24.679	49.705	98,61
2017	25.508	25.083	50.591	98,33

Sumber : data lap kependudukan Kec. Mojoanyar



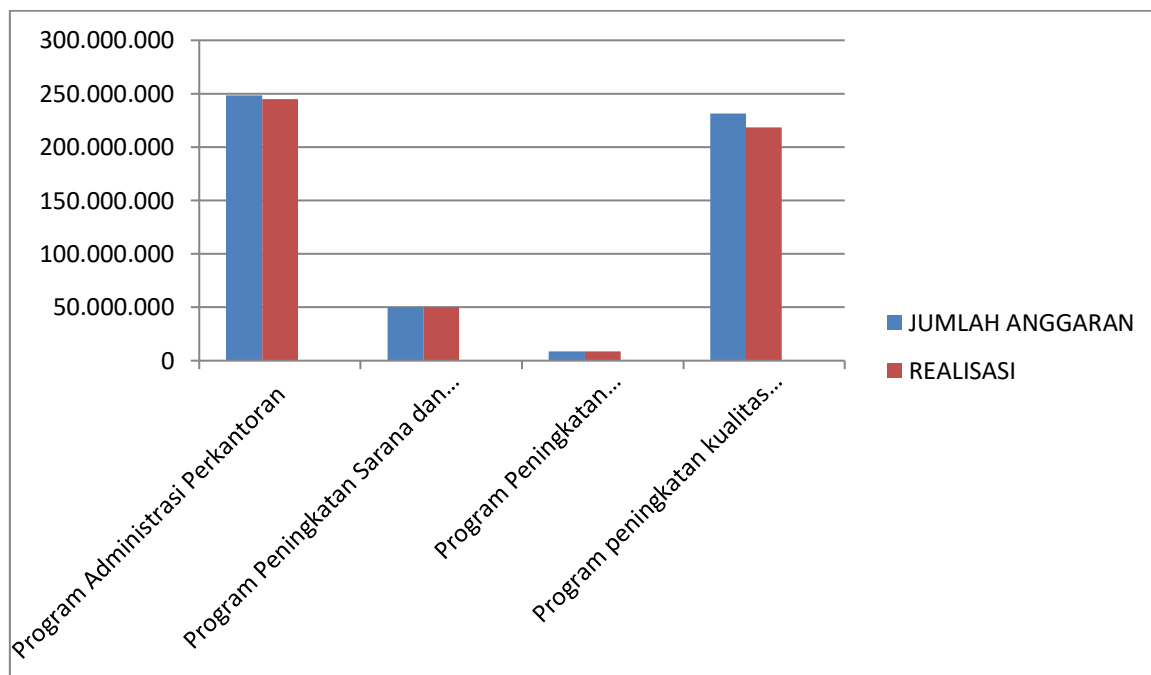
f) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.9

Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.163.065.378,00	2.501.955.719,00	94,99%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.000.000,00	33.854.100,00	99,51%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.000.000,00	78.836.500,00	98,52%

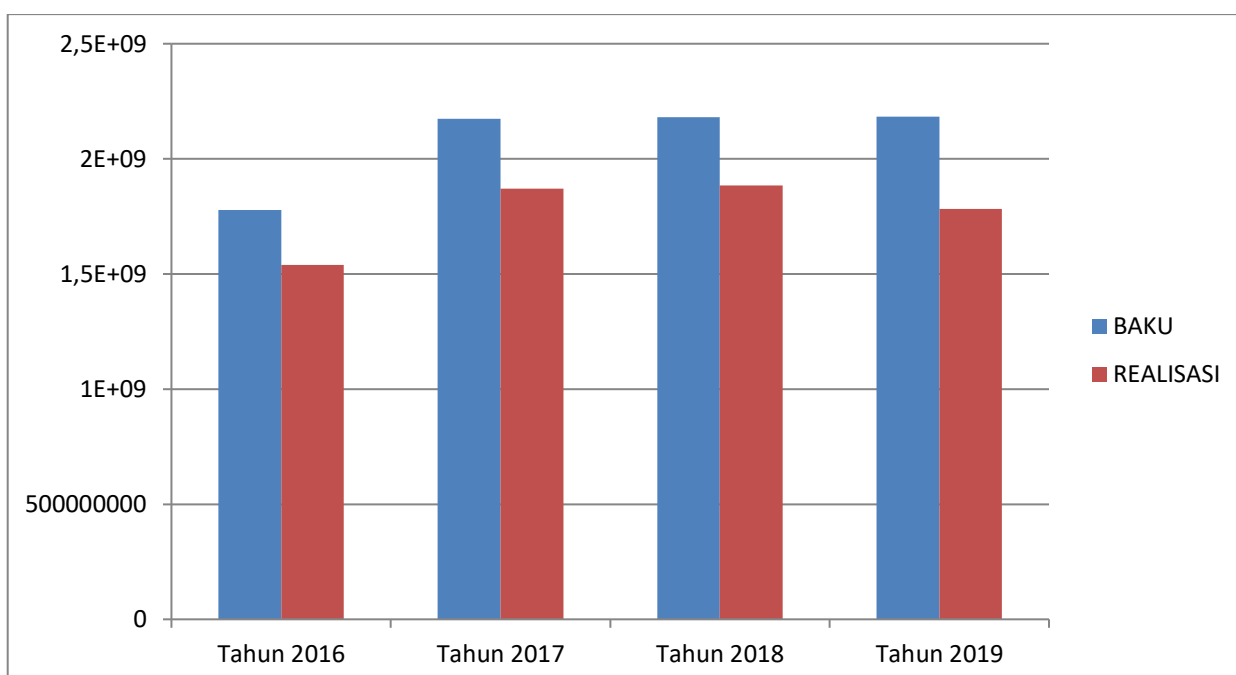
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.900.000,00	56.017.400,00	94,16%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.500.000,00	42.197.100,00	98,80%



Tabel 3.10

Persentase Kenaikan Realisasi PBB Kecamatan Mojoanyar Tahun 2016 s/d Tahun 2021

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	KENAIKAN REALISASI DARI TAHUN SEBELUMNYA	% Kenaikan realisasi dari Tahun Sebelumnya	% Capaian Realisas Pertahun
1	2016	1.778.334.527	1.538.871.568	283.435.237	8	86,53
2	2017	2.174.920.176	1.869.878.798	331.007.230	8,5	85,97
3	2018	2.180.851.890	1.885.369.221	15.490.423	4,6	85,87
4	2020	2.183.893.636	1.575.230.036	(608.663.600)	(6,6)	74,87
5	2021	2.229.823.900	1.682.757.972	(547.065.928)	1,1	75,47



B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021 sebesar Rp. **3.377.465.378,00**

penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. **2.712.860.819,00** atau **80,32%** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Dari 2 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang meliputi 5 Program, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.163.065.378,00	2.501.955.719,00	94,99%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.986.600,00	99,33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	989.400,00	98,94%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	997.200,00	99,72%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.561.535.602,00	1.917.962.793,00	87,38%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.551.535.602,00	1.907.963.693,00	74,78%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.999.100,00	99,99%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000,00	9.991.100,00	90,83%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000,00	9.991.100,00	90,83%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.500.000,00	294.437.620,00	99,37%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000,00	12.985.100,00	99,89%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	240.900.000,00	232.854.810,00	96,66%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.997.810,00	99,98%
Penyediaan Bahan/Material	29.600.000,00	29.520.350,00	99,73%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	68.972.000,00	91,96%

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	68.972.000,00	91,96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.009.776,00	80.821.576,00	96,35
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.029.776,00	27.841.778,00	92,71%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.980.000,00	52.979.798,00	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.200.000,00	74.863.580,00	99,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	29.969.700,00	99,90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.020.000,00	29.990.180,00	99,90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.903.700,00	99,36%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.000.000,00	33.854.100,00	99,51%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000,00	33.854.100,00	99,51%
	Pelaksanaan Urusan	10.000.000,00	9.936.100,00	99,36%

	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	24.000.000,00	23.918.000,00	99,66%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	80.000.000,00	78.836.500,00	98,52%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.000.000,00	78.836.500,00	98,52%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	45.000.000,00	44.440.000,00	98,76%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	34.396.500,00	98,28%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	57.900.000,00	56.017.400,00	94,16%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.900.000,00	56.017.400,00	94,16%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	42.000.000,00	41.960.700,00	99,91%

	Kecamatan			
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.900.000,00	14.056.700,00	88,41%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.500.000,00	42.197.100,00	98,80%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.500.000,00	42.197.100,00	98,80%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.500.000,00	7.486.000,00	99,81%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.250.000,00	11.215.800,00	99,70%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.750.000,00	3.738.300,00	99,69%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.757.000,00	97,57%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	JUMLAH	3.377.465.378,00	2.712.860.819,00	80,32%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategi, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, Indikator kinerja capaian kinerja sebesar 99% yaitu Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan, lalu indikator presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social mencapai 96%.

Adapun secara keuangan dari 5 program pendukung indikator kinerja yang telah dilaksanakan, 11 kegiatan secara keuangan sudah mencapai target 97%.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

1. Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021 sebesar Rp.**3.377.465.378,00** dapat terserap sebesar Rp. **2.712.860.819,00** atau **80,32%**.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Mojoanyarpada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan.

2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah Pegawai di Kecamatan Mojoanyar.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

Mojoanyar, Januari 2021

CAMAT MOJOANYAR



Drs. MOKH. MALIK, MM

Pembina

196609141995031004